

**Judul** : Yang terlibat online scam di Kamboja kembali dipulangkan, WNI, korban eksploitasi atau bagian dari sindikat?

**Tanggal** : Selasa, 03 Februari 2026

**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka

**Halaman** : 2

Yang Terlibat Online Scam Di Kamboja Kembali Dipulangkan

## WNI, Korban Eksploitasi Atau Bagian Dari Sindikat?

Sebanyak 36 Warga Negara Indonesia/Pekerja Migran Indonesia Bermasalah sektor *online scam* (penipuan daring) tiba dari Kamboja, Jumat (30/1/2026). Kedatangan mereka pun menimbulkan perbedaan pandangan, apakah mereka korban atau bagian dari jejaring sindikat. Para WNI tersebut tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat (30/1/2026) malam. Kepulangan mereka ke Tanah Air merupakan kerja sama Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemenuh) dan KBRI Phnom Penh. "Setibanya di Tanah Air, mereka

langsung diserahkan kepada instansi terkait untuk proses penanganan dan pendampingan lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku," kata Jubir 1 Kemenuh Yvonne Mewengkang, dikutip dari RRI. Yvonne menjelaskan, pemulangan ini merupakan pemulangan WNI gelombang pertama dari Kamboja pada tahun 2026. Untuk itu, Kemenuh kembali menghimbau masyarakat untuk selalu mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku apabila akan bekerja di luar negeri. "Menaati seluruh peraturan keimigrasian negara setempat," ujarnya.

Yvonne menyebut, Kemlu RI akan terus memantau perkembangan situasi di Kamboja dan berkoordinasi dengan KBRI Phnom Penh. "Upaya ini demi memastikan pemulangan seluruh WNI dapat berlangsung dengan aman, cepat, dan terkoordinasi," kata Jubir Kemlu RI. Adapun berdasarkan data KBRI Phnom Penh jumlah WNI yang melapor usai berhasil keluar dari sindikat penipuan daring di Kamboja terus bertambah. Hingga 29 Januari 2026 pukul 18.30, tercatat sebanyak 2.752 WNI telah datang ke KBRI Phnom Penh untuk meminta bantuan kepulangan ke Indonesia. Untuk memfasilitasi kepulangan

para WNI, telah dipercepat proses penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki paspor. Upaya ini diperkuat dengan dukungan tim perbantuan teknis kedua dari Ditjen Imigrasi, yang tiba di Phnom Penh Rabu, 28 Januari 2026. Terkait polemik status para WNI tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menekankan, meski negara wajib melindungi, kejelasan status antara korban atau pelaku harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan. "Peristiwa ini menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan dan penegakan hukum secara

berimbang," ujar Dave *Rakyat Merdeka*, Minggu (1/2/2026). Sementara itu, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha berpendapat, pemulangan saja tidak cukup tanpa asesmen forensik digital. "Pemerintah perlu melihat ini sebagai pintu masuk untuk membongkar kemungkinan adanya jaringan domestik yang lebih luas," tegas Pratama kepada *Rakyat Merdeka*, Senin (2/2/2026). Untuk mengetahui pandangan dari Dave Laksono dan Pratama Persadha terkait WNI terlibat online scam di Kamboja, berikut wawancaranya.

**DAVE LAKSONO,**  
Wakil Ketua Komisi I DPR

### Negara Wajib Lindungi, Hukum Tetap Berjalan



“Status mereka, apakah sepenuhnya korban eksploitasi atau terlibat sebagai pelaku, masih memerlukan pembuktian.

Bagaimana Anda melihat kedatangan 36 WNI dari Kamboja yang diduga terkait kegiatan *online scam* ini?

Negara memiliki kewajiban selaku korban eksploitasi atau terlibat sebagai pelaku, masih memerlukan pembuktian. Peristiwa ini menjadi peringatan penting atas kerentanan WNI terhadap kejahatan lintas negara sekaligus momentum untuk memperkuat perlindungan dan penegakan hukum secara berimbang.

Apakah mereka semua bisa dianggap sebagai korban?

Status mereka, apakah sepenuhnya korban eksploitasi atau terlibat sebagai pelaku, masih memerlukan pembuktian. Peristiwa ini menjadi peringatan penting atas kerentanan WNI terhadap kejahatan lintas negara sekaligus momentum untuk memperkuat perlindungan dan penegakan hukum secara berimbang.

Artinya aspek hukum tetap tidak boleh diabaikan?

Betul, kita tidak boleh menutup mata terhadap aspek hukum. Jika terdapat bukti yang kuat bahwa sebagian dari mereka terlibat aktif sebagai pelaku kejahatan, maka proses hukum harus dijalankan secara transparan dan adil.

Bagaimana Anda menanggapi pro-kontra di masyarakat mengenai status mereka?

Pro kontra adalah hal yang wajar. Ada yang melihat mereka sebagai korban perdagangan manusia, ada pula yang menilai mereka sebagai bagian dari jaringan kriminal. Justeru di sinilah peran negara untuk menghadirkan kejelasan melalui investigasi yang komprehensif agar publik tidak terjebak dalam spekulasi.

Langkah apa yang didorong oleh Komisi I DPR untuk mencegah kasus serupa?

Kami menekankan pentingnya

memperkuat aspek diplomasi dan kerja sama internasional dengan negara tujuan agar mekanisme perlindungan WNI lebih efektif. Kami mendorong Pemerintah, khususnya Kemenuh, untuk berkoordinasi erat dengan otoritas negara mitra.

Apakah ada mekanisme khusus yang diusulkan untuk deteksi dini?

Kami mendorong penguatan sistem peringatan dini terhadap potensi eksploitasi WNI di sektor-sektor yang rawan. Kerja sama intelijen dan pengawasan harus diperketat. Sebagai wakil rakyat, saya menekankan pendekatan yang humanis namun tetap tegas. Kita harus melindungi warga negara, tetapi juga mengakkan hukum. Dengan keseimbangan itu, Indonesia menunjukkan komitmen sebagai negara yang beradab dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. ■ **rum**

**PRATAMA PERSADHA,**  
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC

### Jangan Berhenti Hanya Di Pemulangan



“Langkah Pemerintah seharusnya tidak berhenti pada pemulangan semata. Yang jauh lebih krusial adalah proses asesmen komprehensif berbasis intelijen dan forensik digital.

Bagaimana Anda melihat fenomena pemulangan WNI pelaku *online scam* ini dari pandangan keamanan siber?

Tentu ini kembali memunculkan perdebatan klasik antara narasi korban dan pelaku. Dalam konteks kejahatan siber lintas negara, dikotomi ini jarang seodherhana hitam dan putih, karena ekosistem kejahatan digital bekerja dengan model berlipat.

Boleh dijelaskan lebih lanjut?

Individu yang terlibat bisa berada pada posisi yang sangat berbeda, mulai dari sekadar korban perekrutan, operator teknis tingkat rendah, hingga bagian dari jaringan terorganisir dengan peran strategis.

Setelah sebagian dipulangkan, apa langkah penting yang harus dilakukan Pemerintah?

Langkah Pemerintah seharusnya tidak berhenti pada pemulangan semata. Yang jauh lebih krusial adalah

proses asesmen komprehensif berbasis intelijen dan forensik digital.

Apa saja yang perlu dipercepat dari sisi teknis digital mereka?

Pemeriksaan mencakup pemetaan peran, relasi jaringan, serta jejak aktivitas digital. Analisis perangkat elektronik, pola komunikasi, alur transaksi keuangan, serta keterkaitan dengan server tertentu menjadi kunci untuk menentukan posisi mereka yang sebenarnya.

Apakah ada kemungkinan jaringan ini sudah terorganisir hingga ke dalam negeri?

Pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan asumsi, tapi data. Jaringan *scam* sering memiliki simpul pendukung di negara asal untuk rekrutmen hingga penampungan hasil kejahatan. Kita harus melihat ini sebagai pintu masuk membongkar jaringan domestik yang lebih luas.

Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menilai, perlu pendekatan humanis namun tetap tegas dalam kasus ini, bagaimana Anda melihatnya?

Langkah tersebut sangat strategis. Humanis diperlukan untuk melindungi korban eksploitasi agar mereka mau memberikan informasi penting guna memetakan jaringan. Di sisi lain, ketegasan hukum tetap harus hadir bagi mereka yang terbukti berperan aktif. Humanis bukan berarti permisif.

Apakah rekomendasi jangka panjang agar kasus ini tidak terulang?

Harus diikuti penguatan sistem pencegahan seperti literasi digital, pengawasan perekrutan, kerja sama intelijen siber lintas negara, serta rehabilitasi. Tanpa itu, Indonesia akan selalu berada dalam posisi reaktif. Kasus ini harus jadi momentum negara hadir secara cerdas di ruang siber. ■ **rum**